

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan seiring berkembangnya jaman , banyak sekali modal asing yang masuk ke negara kita dan membuat kapitalisme global menguat karena hadirnya perusahaan-perusahaan asing kedalam perekonomian Indonesia. Hal ini cukup menimbulkan kegelisahan bagi kita karena kekuatan modal asing tersebut telah menguasai perusahaan diberbagai sektor bidang. (Sujarweni, 2018)

Saat ini bisnis *franchise* makanan bermodal asing telah ditemui banyak di kota-kota besar. Bisnis franchise makanan asing ini sedang berekspansi, sehingga menjadi *trend* dan kegemaran dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Hal ini ditakutkan masyarakat akan lebih terbiasa mengonsumsi makanan asing seperti *pizza, burger, Korean food*, dan makanan asing lainnya dari pada makanan lokal yang di jual di kedai pinggir jalan seperti bakso, mie ayam, pecel lele, dan makanan lokal lainnya. Untungnya bisnis franchise makanan asing hanya ada dikota-kota besar saja dan belum masuk ke pedesaan , di pedesaan masih banyak UMKM kedai makanan lokal yang diharapkan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.(Sujarweni, 2018)

Menurut (Suroso & Widyaiswara, 2015) pada tahun 2015 diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sebagai suatu bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi Asia Tenggara. MEA adalah agenda dibentuknya pasar tersendiri untuk melakukan perdagangan bebas barang ,jasa, dan investasi di kawasan asia tenggara. Hal ini berarti suatu negara akan bebas menjual barang dan jasa kenegara lain diseluruh Kawasan Asia Tenggara dan membuat kompetisi akan semakin ketat.

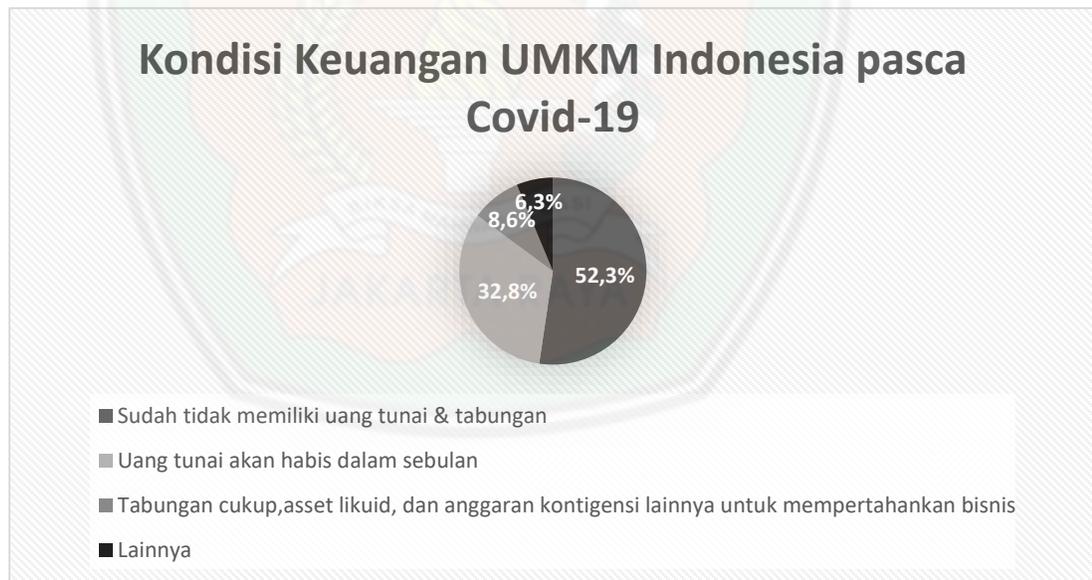
MEA akan memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menjelajahi pasar yang lebih luas di Asean , akan tetapi Indonesia juga mendapat tantangan untuk bersaing dengan produk dari negara lain. Untuk itu banyak sekali upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Salah satunya adalah pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

UMKM merupakan wujud dari kemandirian ekonomi nasional dan memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data UMKM pada [www.kemenkopukm.go.id](http://www.kemenkopukm.go.id) Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia 65,47 juta usaha atau memiliki kontribusi 99,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa menganalisis kinerja UMKM di Indonesia merupakan hal yang menarik, relevan dan bermanfaat untuk dilakukan. Dengan hal tersebut, potensi pengembangan UMKM dapat diidentifikasi. UMKM juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB.

UMKM menciptakan nilai tambah yang besar dengan jumlah usaha yang mencapai 99 persen dari seluruh usaha nonpertanian di Indonesia, kontribusi UMKM dalam membentuk PDB Indonesia mencapai lebih dari 50 persen pada tahun 2016, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2017-2019 yaitu sebesar rata-rata 60 persen Pada tahun 2020 diperkirakan kontribusi UMKM terhadap PDB tidak goyah bahkan mengalami kenaikan ditengah menurunnya perkonomian Indonesia akibat pandemi *Covid-19* begitu juga pada tahun 2021-2024 Kementrian koperasi dan UKM telah memnargetkan kenaikan kontribusi PDB UMKM sebesar 62,3 persen pada tahun 2021 dan 65 persen pada tahun 2024 hal ini dikarenakan akan didorongnya UMKM untuk naik kelas, salah satu indikator strategis yang dapat mewujudkan UMKM naik kelas adalah menargetkan PDB UMKM pada angka tersebut. (KEMENKOPUKM, 2021)

Di dukung dengan pernyataan diatas bahwa menggerakkan UMKM memang diperlukan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang memburuk akibat dampak dari pandemi covid 19. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa terjadinya kearah resesi ekonomi karena dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan baik perekonomian nasional maupun global. Untuk itu pemerintah akan menjalankan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu target program PEN adalah menggerakkan UMKM, pemerintah akan mengambil kebijakan antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan. Kebijakan-kebijakan ini dapat meningkatkan kemampuan keuangan UMKM dimana hal inilah yang masih menjadi permasalahan pada UMKM (Nainggolan, 2020)

**Gambar 1.1 Kondisi Keuangan UMKM Indonesia Pasca Covid-19**



*sumber : Yusof Ishak Institute*

Mengacu pada penelitian yang dilakukan Yanuar Nugroho dan Siwage Dharma Negara yang dilakukan di *Yusof Ishak Institute* menyatakan bahwa lebih dari 50 persen pelaku UMKM Indonesia mengaku sudah tidak memiliki

uang tunai serta tabungan yang digunakan untuk kelanjutan bisnisnya di masa pandemi covid-19, lebih dari 30 persen pelaku UMKM mengaku bahwa dana yang dimilikinya saat ini hanya habis dalam sebulan dan tidak ada tabungan, sementara hanya 8,6 persen saja pelaku UMKM yang memiliki tabungan, asset dan persiapan untuk melanjutkan membangun bisnisnya dimasa pandemi ini (Gambar 1.2) Hal ini sangatlah jelas bahwa manajemen keuangan sangatlah dibutuhkan pada UMKM di Indonesia untuk menghindari kesulitan keuangan pada bisnis mereka (Nugroho & Negara, 2020)

**Gambar 1. 2 Hasil Pra-Riset Perilaku Keuangan Pelaku UMKM Kedai Makanan di Desa Bahagia**



Sumber : Kuesioner Pra-Riset, 2021

Berdasarkan hasil pra-riiset yang dilakukan dengan melibatkan 30 responden menyatakan bahwa perilaku keuangan pelaku UMKM Kedai Makanan di Desa Bahagia sangatlah beragam. Tingkat literasi keuangan pelaku UMKM Kedai Makanan di Desa Bahagia tidak terlalu rendah namun juga tidak tinggi, mayoritas dari mereka hanya paham dasar pengetahuannya saja, seperti melakukan perencanaan dan anggaran namun

untuk lebih lanjut seperti menabung, investasi dan lainnya masih perlu pembelajaran lagi. Untuk tingkat inklusi keuangan pelaku UMKM kedai makanan di Desa Bahagia masih sangatlah rendah, mereka mayoritas mengambil kredit namun belum memahami aspek-aspek yang harus diperhitungkan. Terakhir untuk tingkat pendidikan para pelaku UMKM kedai makanan di Desa Bahagia mayoritas dari mereka telah menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun dan mereka mengelola usaha yang mereka kembangkan dengan dasar-dasar yang mereka dapati di bangku sekolah namun untuk pengembangan pengetahuan diluar pendidikan wajib mereka masih belum terlalu mengikuti.

Perilaku keuangan yang baik pada pelaku UMKM sangatlah dibutuhkan untuk mengambil keputusan keuangan dan membantu keluar dari permasalahan keuangan. Kesulitan keuangan muncul bukan hanya karena menurunnya pendapatan saja, namun juga dapat terjadi karena kesalahan dalam pengelolaan keuangan atau kurangnya literasi keuangan yang dimiliki misalnya kesalahan dalam penggunaan kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan. (Yushita, 2017)

Literasi keuangan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan pribadi, Adanya literasi keuangan akan membantu individu mengelola rencana keuangan pribadi sehingga individu dapat memaksimalkan nilai waktu dari uang dan keuntungan pribadi akan lebih besar dan akan meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam hal ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM dimana para pelaku UMKM dapat membuat perencanaan uang usahanya dengan baik dan dapat meningkatkan taraf usahanya dengan baik, khususnya pada saat pandemi *covid-19* dimana beberapa UMKM yang pendapatannya menurun dan banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan jika UMKM tidak memiliki literasi keuangan yang cukup maka sulit untung UMKM dapat mengambil keputusan keuangan yang baik. (Yushita, 2017)

Inklusi keuangan juga merupakan salah satu faktor yang ditekankan pada UMKM untuk mengurangi permasalahan keuangan pada suatu usaha. Berdasarkan Perpres No. 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), inklusi keuangan merupakan salah satu upaya untuk menambah akses dan peluang kegiatan ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Dikeluarkannya instrumen ini dikarenakan instrumen sebelumnya yaitu Perpres No. 82 Tahun 2016 tentang SNKI yang menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 75 persen telah tercapai pada tahun 2019. Berdasarkan data OJK 2019 tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 76,19 persen. sehingga presiden menetapkan target inklusi keuangan yang baru yaitu sebesar 90 persen untuk tahun 2024.

Inklusi keuangan sangatlah penting disaat pandemi *Covid-19* sekarang ini dikarenakan dengan memperluas akses keuangan maka akan semakin membantu mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan adanya inklusi keuangan ini akan membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya dengan memberi akses pembiayaan untuk menguatkan permodalan UMKM dan mendukung pemberdayaan UMKM ditengah pandemi *Covid-19* ini. (Kumaran, 2021)

Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor permasalahan pada UMKM khususnya UMKM kedai makanan di Desa Bahagia tingkat pendidikan yang rendah pada pelaku usaha menyebabkan literasi keuangan dan perencanaan keuangan belum menjadi acuan untuk mengambil keputusan keuangan. Menurut (Imtihan & Nazaruddin, 2017) pendidikan merupakan peran utama untuk memahami teknologi dan meningkatkan kapasitas *modern* untuk menciptakan perkembangan yang berkepanjangan.

Berdasarkan pada latar belakang dan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Literasi Keuangan , Inklusi Keuangan , dan Tingkat Pendidikan terhadap Perilaku Keuangan Pelaku UMKM Kedai/Warung Makanan di Desa Bahagia”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang ingin diidentifikasi adalah masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan pada pelaku UMKM kedai/warung makanan didesa Bahagia?
2. Apakah terdapat pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan pada pelaku UMKM kedai/warung makanan didesa Bahagia?
3. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Perilaku Keuangan pada pelaku UMKM kedai/warung makanan didesa Bahagia?

## **1.3 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan pada pelaku UMKM kedai/warung makanan didesa Bahagia?
2. Bagaimana pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan pada pelaku UMKM kedai/warung makanan didesa Bahagia?
3. Bagaimana Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Perilaku Keuangan pada pelaku UMKM kedai makanan didesa Bahagia?

#### **1.4 Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas , maka peneliti akan memfokuskan permasalahannya. Masalah yang akan diteliti dan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan data dilakukan pada UMKM kedai/warung makanan
2. Pengambilan data dilakukan di wilayah Desa Bahagia
3. Periode pengambilan data dari Maret 2021 sampai dengan Mei 2021
4. Objek penilitan adalah pemilik/karyawan UMKM

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan pada pelaku usaha UMKM kedai/warung makanan didesa Bahagia.
2. Menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan pada pelaku UMKM kedai/warung makanan didesa Bahagia.
3. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku keuangan pada pelaku UMKM kedai/warung makanan didesa Bahagia.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu yang bermanfaat untuk memperkaya wawasan tentang literasi keuangan , inklusi keuangan , dan bagaimana perilaku keuangan pada UMKM.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademik

Dari penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat dijadikan referensi pada perkembangan materi khususnya pada bidang keuangan khususnya mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan yang diterapkan pada baik keuangan usahanya maupun keuangan pribadi serta dapat dijadikan acuan untuk penulisan penelitian pada pokok bahasan yang serupa.

### b. Bagi Pelaku UMKM

Dari hasil penelitian ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangan UMKM khususnya dalam mencari pendanaan, mengelola dan merencanakan keuangan dengan lebih baik sampai tercapainya kesejahteraan

### c. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat menjadikan bahan untuk pertimbangan, saran, dan masukan bagi instansi pemerintah yang berwenang.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dijadikan pedoman pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan mengenai pengertian literasi keuangan , inklusi keuangan , tingkat pendidikan , perilaku keuangan dan peneliti terdahulu

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel dan teknik analisis data.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan mengenai hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan penelitian dan saran.

